

Bab 6

INDIKATOR KINERJA DINAS PERKEBUNAN YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Setiap perencanaan pembangunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) suatu wilayah otonomi daerah memiliki sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana sistem tersebut merupakan instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator atau target kegiatan yang dapat diukur, dinilai, dan dilaporkan secara menyeluruh, terpadu, dan valid untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Sistem tersebut juga merupakan alat untuk melakukan evaluasi, monitoring, hingga bahan perencanaan ke depan oleh suatu SKPD dalam melihat efektivitas kinerja instansinya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diantisipasi atau diminimalisir.

Dalam menilai efektivitas suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan suatu indikator kinerja yang merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh SKPD memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja merupakan sesuatu yang secara nyata dapat dihitung karena akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan SKPD di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki penetapan standar pelayanan sebagai cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator

kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan tidak terlepas dari teknis pengembangan subsektor perkebunan pada perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja tersebut dirumuskan dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan teknis pembangunan berbasis sektor pertanian (khususnya subsektor perkebunan) dengan acuan tujuan dan sasaran RPJMD itu sendiri.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya pengukuran kinerja dan penentuan indikator kinerja yang sesuai. Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome*, dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan pada bisnis hanya berorientasi pada mata uang sebagai keuntungan usaha. Meskipun begitu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tetap berusaha optimal untuk menyusun indikator kinerja sebagai landasan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah disusun melalui berbagai tahapan ini akan memacu setiap elemen di lingkungan Dinas Perkebunan untuk dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan akan berbanding lurus dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Luas kebun sawit (Juta Ha)	1,02	1,12	1,3	1,6	1,8	2,0	2,0
2	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	30	30	3	4	4	5	5
3	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	139.656 Ha	139.656 Ha	143.156 Ha	146.656 Ha	150.156 Ha	153.656 Ha	153.656 Ha
4	Jumlah emisi yang diturunkan	218.75 CO2E	218.75 CO2E	250 CO2E	281.25 CO2E	312.50 CO2E	343.75 CO2E	343.75 CO2E
5	Kontribusi industri olahan non migas PDRB triliun	24	-	-	-	-	-	38.4

